

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Negara dengan wilayah terluas di Afrika, Sudan kembali mengalami ketegangan akibat konflik yang menyebabkan krisis kemanusiaan terjadi. Konflik yang berdasar atas alasan yang kompleks di Darfur menarik perhatian dunia khususnya negara barat. Hal ini berbeda dengan konflik – konflik sebelumnya yang terjadi di Sudan.

Sejak Februari 2003 pemberontakan di wilayah Darfur yang terletak di sebelah barat Sudan terjadi. Saat ini krisis Darfur telah mengakibatkan lebih dari satu juta jiwa mengungsi dan korban yang tewas antara 30.000 - 50.000 jiwa. Diperkirakan jumlah korban ini akan terus bertambah mengingat konflik ini belum mereda sampai saat ini. Sebagian besar penduduk di Darfur menyelamatkan diri dengan mengungsi ke negara tetangga, yaitu Chad.<sup>1</sup>

Keadaan pengungsi ini sangat mengenaskan karena kekurangan bahan makanan, minum dan obat – obatan. Mereka harus sabar menunggu untuk mendapatkan kiriman bantuan. Tidak hanya bahan makanan dan obat – obatan, peralatan untuk tenda sangat diperlukan. Tenda – tenda yang mereka jadikan tempat tinggal terbuat dari patok kayu tanpa dinding dan atap yang sempurna.

Kondisi kesehatan yang mereka alami sangat jauh berada di bawah normal. Selain karena kondisi tenda, alam sekitar, dan sanitasi yang tidak layak, sebagian besar pengungsi juga mengalami kelaparan dan malnutrisi.

---

<sup>1</sup> Kompas Internasional "Tragedi Darfur, Ujian Bagi Afrika" Minggu, 1 Agustus 2004

Pengiriman bantuan sulit dilakukan karena letak kamp - kamp pengungsi berada di kawasan yang tersebar dan relatif terisolasi. Bagi perempuan kehidupan di kamp sangat rentan dengan pelecehan dan kekerasan seksual. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain tetap bertahan hidup di kawasan tersebut.

Masyarakat dunia menyebut tragedi ini sebagai "*The Worst Humanitarian Crisis of Our Time*". Bahkan pihak barat seperti Amerika Serikat dan sekutunya menganggap sebagai genoside. Mereka merujuk pada krisis di Rwanda mengenai pembunuhan besar - besaran yang memusnahkan etnis tertentu.

Alasan yang dikemukakan adalah adanya milisi *Janjaweed* bersikap pro pada pemerintah Khartoum dan milisi ini diklaim sebagai bentukan pemerintah. Tujuannya sebagai tandingan atas pemberontak yang ada di Darfur yaitu *Justice and Equality Movement ( JEM )* dan *Sudan Liberation Movement ( SLM )*. Pecahnya konflik di barat bukan merupakan pemberontakan murni dari para pemberontak di utara, melainkan berkaitan dengan usaha kelompok oposisi di Sudan Selatan. Adanya proses pemecah - belahan bangsa Sudan telah terjadi.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh adanya intervensi pihak asing dalam konflik internal di wilayah Sudan, terutama dalam hal ini intervensi Amerika Serikat. Tindakan pemerintah Amerika Serikat yang mengirimkan wakilnya untuk melakukan kunjungan serta mendesak resolusi PBB segera dikeluarkan, menimbulkan berbagai asumsi baru.

Tidak dipungkiri selama ini Pemerintah Amerika Serikat dikenal sebagai negara super power yang selalu turut campur dalam persoalan dalam negeri berbagai negara lain. Setelah perang dunia kedua, Amerika Serikat selalu memposisikan dirinya sebagai polisi dunia. Telah banyak sejarah yang

menunjukkan intervensi AS di berbagai belahan dunia, baik intervensi secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan paparan di atas, dalam kesempatan kali ini penulis akan mengupas permasalahan konflik di Sudan dengan mengajukan judul :

*“Low Coercion Choice Amerika Serikat dalam Konflik di Sudan”*.

## **B. Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Mengetahui akar permasalahan konflik yang terjadi di wilayah Barat dan Selatan Sudan.
2. Mengetahui bentuk – bentuk intervensi Amerika Serikat dalam penanganan krisis Sudan.
3. Mengetahui kepentingan Amerika Serikat yang menjadi faktor pendorong dalam melakukan intervensi di negara Sudan.
4. Untuk memenuhi mata kuliah Skripsi, yang digunakan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana ( S-1 ) pada jurusan ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Sudan merupakan sebuah negara yang berada di kawasan Afrika Timur Laut. Negara ini juga menempati posisi sebagai negara terluas di kawasan Afrika dan termasuk negara multi etnis. Terdapat sekitar 600 Suku serta menggunakan

lebih dari 400 bahasa daerah. Etnis mayoritas adalah bangsa Arab sebesar 40 % dan sebagian besar berada di wilayah utara.<sup>2</sup>

Sejak awal pembentukan negara ( *nation building* ) wilayah ini telah mengalami konflik. Sudan memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1956. Konflik ini bagai gelombang pasang surut sesuai dengan pergantian rezim dari periode ke periode.dengan berbagai faktor yang kompleks. Faktor – faktor yang menjadi landasan tersebut antara lain : perebutan bahan makanan antar suku, kesenjangan ekonomi antar wilayah, faktor agama dan ideologi bahkan sampai perebutan kursi kekuasaan.

Keberagaman etnis, ideologi dan agama di Sudan turut serta membentuk golongan – golongan yang pada akhirnya berafiliasi pada permasalahan politik. Antara lain terbentuk partai – partai yang berdasar pada kelompok Islam, demokrat, komunis, dan sekuler. Penduduk Sudan mayoritas memeluk agama Islam, adapun Kristen dan agama tradisional Afrika menjadi agama minoritas di Sudan.

Adanya kelompok – kelompok oposisi yang mendorong pemberontakan di wilayah Sudan. Pemberontakan melawan pemerintah ini bermula dari wilayah selatan. Pada awalnya konflik ini dilatarbelakangi perbedaan etnis dan agama. Penduduk di wilayah selatan ini mayoritas adalah etnis Afrika, beragama Kristen dan penganut animisme. Sedangkan pusat pemerintahan Sudan di wilayah utara di dominasi etnis arab dan muslim.

---

<sup>2</sup> “Krisis Darfur Tidak Basi AS” diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/07/>

Konflik kemudian berlanjut dengan alasan kesenjangan hasil pembangunan antara wilayah pusat dengan selatan. Pemerintah pusat dianggap terlalu mendominasi aspek bidang sosial, politik, dan ekonomi. Pemberontakan bersenjata ini mampu membuat goyah stabilitas politik dan ekonomi Sudan .

Kestabilan politik di kawasan ini sempat tercapai pada masa pemerintahan Jafar Numayri. Pada tahun 1972, Presiden Numayri melakukan kesepakatan damai dan menindaklanjuti dengan pemberlakuan otonomi daerah dan melakukan percepatan budaya dan ekonomi.

Namun demikian, tindakan Presiden Numayri yang memberlakukan syariat Islam pada tahun 1983 menimbulkan ketegangan kembali antara wilayah utara dan selatan. Ketegangan terjadi antara kelompok *Sudan People Liberation Army* ( SPLA ) yang dipimpin oleh John Garang dengan pemerintah Khartoum.<sup>3</sup> John Garang merupakan pimpinan kelompok separatis yang selama ini menjadi aktor di belakang pemberontakan di wilayah Sudan selatan pasca gerilyawan Anyanya

Pada tanggal 20 Juli 2002, di Machakos, Kenya, tercapai kesepakatan antara pemerintah pusat dan pihak pemberontak di Sudan Selatan untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung lama dan memakan banyak korban ini. Kesepakatan yang dimediasi oleh *Inter Governmental Authority for Development* ( IGAD ) mensyaratkan adanya masa transisi selama 6 tahun di Sudan Selatan dan kemudian akan diakhiri dengan penyelenggaraan referendum di daerah tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Budi Rahmat Surya Saputra, "Krisis Darfur dan Kepentingan Amerika Serikat" diakses dari

Kesepakatan pun berlanjut melalui penandatanganan perjanjian perdamaian antara kelompok SPLA dengan pemerintah pada Mei 2004 lalu. Namun setelah konflik di Sudan Selatan dianggap mulai menemui titik terang penyelesaian masalah, muncul krisis baru di daerah barat Sudan, yaitu di wilayah Darfur. Konflik di Darfur di mulai Februari 2003 setelah kelompok pemberontak mulai menyerang fasilitas – fasilitas pemerintah.

Menurut analisa perlakuan ini sebagai bentuk kekecewaan akibat perhatian pemerintah pusat terhadap belahan barat yang sangat kurang. Soal etnis pun kemudian mengemuka. Mereka meminta pengakuan dari pemerintah Sudan yang di dominasi ras Arab. Kelompok pemberontak itu antara lain Gerakan Keadilan dan Kesetaraan ( *Justice and Equality Movement / JEM* ) dan Gerakan Pembebasan Sudan ( *Sudan Liberation Movement / SLM* ).

Sejak dulu di Darfur memang dipenuhi dengan pertikaian terbatas antar kabilah – kabilah Arab dan Afrika. Pertikaian ini sering terjadi khususnya di musim penghujan dan pada saat kekurangan makanan. Perang itu di sokong dengan adanya merebaknya senjata api di tangan para kabilah. Nyatanya sebagian kabilah dari ras Arab justru menciptakan ketegangan bersenjata .

Di Darfur ada gerakan separatistis dari ras Afrika. Mereka dinamakan Toro Poro. Gerakan ini sudah ada sebelum terbentuknya milisi Janjaweed. Milisi Janjaweed merupakan milisi yang selama ini dianggap pro pemerintah. Tetapi yang menjadi persoalan utama di Darfur adalah intervensi gerakan separatistis di Selatan pimpinan John Garang.<sup>5</sup>

Sebuah informasi di pusat Pelayanan Media Sudan menemukan bukti keterlibatan John Garang. Pada 27 Juni 2004 sebuah pesawat mendarat di kawasan Gunung Marah, markas gerakan separatis Darfur. Pesawat milik John Garang tersebut dipenuhi oleh para wartawan norwegia yang sengaja diundang guna memperkuat opini publik ihwal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Sudan.<sup>6</sup>

Tujuan keterlibatan kelompok separatis ini adalah merusak kesatuan Sudan dan melemahkan pemerintahan Khartoum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini perjuangan SPLA pimpinan John Garang senantiasa mendapat dukungan dari Amerika Serikat.

Konflik di Darfur ini menelan korban antara 30 000 – 50 000 orang, lebih dari satu juta orang meninggalkan kampung halaman mereka, sementara 2 juta lainnya kini terancam kekurangan makanan. Krisis ini mengundang reaksi internasional. Masyarakat internasional menyebut krisis ini sebagai *"the worst humanitarian crisis of our time"*<sup>7</sup>

Uni Eropa menekan pemerintah Sudan dengan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Sudan jika tidak menghentikan konflik bersenjata di Darfur. Uni Afrika juga memprakarsai pertemuan antara pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak di Darfur. Bahkan Uni Afrika mengirimkan 60 orang pengamat gencatan bersenjata dan 270 tentara untuk melindungi para pengamat tersebut.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Kompas, Internasional, "Korban Tewas di Sudan Mencapai 50.000 Jiwa", 25 Juli 2004

wilayah lain seperti Palestina. Mereka meyakini bahwa kepedulian Pemerintah AS memiliki motif tertentu. Terlebih lagi selama ini Amerika Serikat ikut berperan dalam perjuangan John Garang, kelompok oposisi di Selatan.

#### **D. Pokok Permasalahan :**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yang bisa dijadikan sumber penelitian, yaitu : *Mengapa Amerika Serikat melakukan intervensi terbatas ( low coercion choice ) dalam konflik di Sudan?*

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

##### **1. Konsep Intervensi**

Intervensi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak asing terhadap urusan domestik suatu negara dan memberikan dampak terhadap negara tersebut.<sup>10</sup> Dampak yang terjadi bisa berbentuk perubahan situasi politik, opini publik, dikluarkannya kebijakan baru, bahkan sampai tumbanganya rezim yang sedang berkuasa.

Pada hakikatnya intervensi merupakan representasi dari pembentukan aturan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah daripada aturan hukum. Bagi aktor yang kuat maka dia yang berkuasa lebih dari hukum yang telah disepakati. Akibatnya dapat mengancam keharmonisan hubungan masyarakat internasional.

---

<sup>10</sup> Joseph S. Nye, "Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History", Howard University, Longman Inc., 1997, Hal 134

Intervensi yang dilakukan oleh super power memiliki tiga model, antara lain yaitu :

1. Diundang oleh penguasa<sup>11</sup>

Penguasa mengundang pihak asing dengan tujuan menjaga wilayahnya dari tekanan negara lain atau untuk mempressure kekuatan pemberontak di dalam negeri. Biasanya ini dilakukan oleh negara yang kekuatan nasionalnya lemah.

2. Di undang oleh kelompok oposisi<sup>12</sup>

Keberlangsungan hidup sebuah negara hanya dapat dengan dukungan dari semua kelompok dalam batas wilayah mereka. Masing-masing kelompok dalam masyarakat ini memiliki standarisasi tertentu atas kondisi yang dirasakan dalam negara tersebut. Jika ada kelompok yang tidak terpenuhi aspirasinya seringkali berujung pada perpecahan sosial. Perpecahan sosial yang dalam dan beberapa kelompok dalam masyarakat merasa tertindas dapat menyebabkan kekacauan sipil.

Ketika terjadi perpecahan social, Kelompok – kelompok sosial untuk mencapai strategi yang efektif membutuhkan tindakan politik yang diorganisasi dengan baik bahkan sangat keras. Kecenderungannya mereka akan menggunakan dukungan dari pihak luar. Dari pihak asing mereka akan memperoleh dana, propaganda, latihan, persenjataan dan jaringan diplomasi di wilayah internasional dengan janji pemberian imbalan ketika mereka telah mencapai kekuasaan. Semakin erat hubungan ini

---

<sup>11</sup> Sidik Jatmika, “*Sebab – Sebab Konflik di Timur Tengah*“, Bahan Kuliah Politik dan

dimungkinkan akan meningkatkan kepentingan – kepentingan dalam negeri.

### 3. Memiliki agenda tertentu <sup>13</sup>

Menurut pelaku intervensi, tindakan melakukan intervensi merupakan simbiosis mutualisme. Dalam masa modern seperti sekarang ini motif utama yang mendasari sebuah negara *super power* melakukan intervensi yaitu untuk menjamin kelangsungan pemerintahan suatu negara yang bersahabat dalam lingkup wilayah pengaruhnya (*Sphere of Influence*).<sup>14</sup> Pelaku intervensi sudah dapat dipastikan berasal dari negara besar. Dikarenakan untuk memberikan dukungan terhadap kelompok tertentu akan membutuhkan dana, teknologi, jaringan, bahkan kekuatan militer yang sangat besar.

Penyokong dapat melakukan intervensi atas nama kelompok ataupun fraksi. Setelah memperoleh kekuasaan maka akan menggumakan pengaruhnya bersama kelompok untuk menjamin kepentingan luar negerinya. Dan pada kenyataannya sekarang ini setiap golongan politik yang tidak stabil di suatu negara akan membuka peluang intervensi dari luar.

Oleh karena itu kita dapat mengemukakan sebuah hipotesis bahwasanya semakin besar konflik kesukuan, keagamaan, ekonomi maupun ideologi dalam suatu masyarakat. Maka akan semakin besar kemungkinan peluang

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> K.J.Holsti, "Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis", Alih Bahasa : M. Tahir Azahary, S.H, Penerbit Erlangga, 1998, Hal 9



*Kedua*, melalui penyiaran, yaitu dengan adanya program pembentukan opini publik melalui berita – berita di media massa, baik televisi, majalah, koran, radio, maupun internet. *Ketiga*, bantuan ekonomi, merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi urusan domestik negara lain. *Keempat*, penyediaan para penasehat militer. *Kelima*, intervensi dengan mendukung kelompok oposisi. *Keenam*, Blokade. *Ketujuh*, aksi militer terbatas. *Kedelapan*, okupasi atau invasi militer secara menyeluruh.

Negara *super power* dalam melakukan intervensi akan membentuk karakteristik – karakteristik yang terpola dan terpadu, antara lain :<sup>16</sup>

1. Ketimpangan ( asimetris ) kekuasaan yang besar terjadi antar negara super power dan negara yang menjadi sasaran. Intervensi dianggap sebuah jalan pintas untuk mencapai solusi dengan mudah.
2. *Super power* akan senantiasa mengajak negara - negara sekutunya untuk berbagi kekuasaan. Negara sekutu merupakan mitra yang sangat mengerti akan asas dan tujuan sehingga akan selalu melindungi semua aksinya di balik sebuah legitimasi kolektif. Sehingga seolah – olah aksi ini telah disepakati dan atas nama sebuah organisasi regional.
3. Untuk meminimalisir kemungkinan stigma atau pemikiran yang buruk akibat intervensi, negara *super power* menerapkan metode okupasi yaitu “ *cepat masuk dan cepat keluar* “. Sehingga mereka tidak akan tinggal lama di negara korban lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan.

---

<sup>16</sup> Conway W Henderson, " *International Relations: Conflict and Cooperation at The Turn Of 21th* Century " , *Journal of International Political Science*, 1998, hal 151

4. Motif dari intervensi adalah untuk menempatkan kelompok yang disukai untuk memimpin pemerintahan dan menopang kelangsungan kekuasaan tersebut.

Dalam “ *Just and Unjust War* ”, Michael Walzer menyatakan bahwa ada empat situasi dimana perang atau intervensi militer secara moral dibenarkan, yaitu :<sup>17</sup>

1. Tindakan intervensi yang bertujuan untuk mencegah sesuatu hal yang buruk ( *pre-emptive intervention* ).
2. Tindakan intervensi dilakukan untuk mengimbangi tindakan intervensi yang sebelumnya terjadi.
3. Intervensi yang bertujuan untuk menyelamatkan orang – orang yang terancam terbunuh dalam pembantaian massal / genoside ( *humanitarian intervention* ).
4. Kewajiban untuk membantu gerakan pemisahan diri ketika kelompok oposisi mampu menunjukkan identitas dan karakternya yang representative. Adanya kelompok oposisi dalam suatu negara yang telah secara jelas menginginkan untuk memisahkan diri dari kedaulatan negara. Maka intervensi dibenarkan karena akan membantu mereka untuk memperoleh hak dan membentuk otonomi yang mandiri sebagai sebuah

Amerika Serikat sebagai negara adikuasa telah sejak lama menerapkan intervensi seperti diungkapkan dalam konsep di atas. Sejarah panjang Amerika Serikat tidak terlepas dalam mencampuri berbagai urusan domestik negara lain. Berikut ini beberapa contoh dari tindakan – tindakan intervensi yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat :<sup>18</sup>

Tabel 2

**Sejarah Intervensi Amerika ke Berbagai Negara**

NO.	TAHUN	PERISTIWA
1	1930	Presiden Franklin D Rosevelt mendorong lahirnya kebijakan bertetangga baik
2	1950	Ancaman ekspansi komunis memaksa USA untuk melakukan aksi intervensi selama periode perang dingin.
3	1954	USA menggulingkan pemerintahan komunis di Guatemala, tetapi mengalami kegagalan menggulingkan Fidel Castro dalam invasi di Teluk Babi pada tahun 1967.
4	1962	Presiden John F Kennedy mengintervensi Kuba dengan menciptakan blockade angkatan laut guna mencegah pengiriman hulu ledak nuklir jarak menengah dari USSR ke Kuba.
5	1965	Menggunakan jubah legitimasi organisasi negara di Benua Amerika ( OAS ), USA mengintervensi Republik Dominika.
6	1980	USA mengintervensi Nikaragua melalui “ <i>Contra</i> ”

7	1983	USA mendukung penggulingan pemerintahan Komunis di Grenada.
8	1989	USA mengintervensi Panama melalui " <i>Operation Just Cause</i> "

Sumber : Conway W Henderson, " *International Relations : Conflict and Cooperation at The Turn Of 21th Century*" , Mc Graw Hill International Editions, Political Science Series, 1998, hal 151 - 152

Tindakan ini juga diterapkan oleh Amerika Serikat di wilayah Sudan yang telah lama mengalami krisis akibat konflik internal. Bentuk – bentuk intervensi yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat telah mencapai tingkatan *low choercien choice*.

Langkah tersebut dilakukan melalui pengeluan pernyataan oleh pejabat tinggi, pembentukan opini melalui media massa, bahkan sampai dengan mendukung kelompok oposisi. Amerika Serikat juga masih terus melaksanakan aktivitas diplomasi untuk menekan pemerintah Khartoum antara lain dalam proses negosiasi antara Pemerintah Sudan dengan SPLA ataupun penyelesaian krisis di Darfur.

Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan dukungannya sejak berkejolak pemberontakan di wilayah selatan oleh SPLA. Sikap ini tercipta salah satunya atas usaha kelompok oposisi. Kelompok oposisi di Sudan, yaitu SPLA ( *Sudan People Liberation Army* ) untuk mencapai tujuannya telah meminta dukungan dari pihak asing yaitu pemerintah Amerika Serikat. Dari pihak asing,

Dukungan persenjataan tersebut sengaja diselundupkan kepada para pemberontak melalui jalur perbatasan Sudan yaitu Ethiopia, Eritrea, dan Uganda. Selain mempererat jaringan dengan pihak asing, kelompok SPLA juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai kelompok pemberontak di wilayah Sudan Selatan maupun Barat

Bentuk – bentuk intervensi ini terus dilanjutkan pada saat pecah krisis di Darfur. Pemerintah Amerika Serikat membentuk opini dunia melalui media massa. Adanya isu pembersihan etnis ( *genocide* ) yang telah dilakukan oleh milisi *Janjaweed*, pemerkosaan dan pembantaian massal diberitakan dalam berbagai media massa secara berlebihan.

Persebaran informasi pada masa sekarang ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Informasi sangat mudah sekali diakses akan mempermudah mempengaruhi pola pemikiran masyarakat. Strategi ini telah di gunakan untuk membentuk stigma akan adanya *genocide* di Sudan Barat.

Laporan dari *Amnesty Internasional* dan *Human Right Watch* menyatakan bahwa milisi *Janjaweed* telah melakukan pembunuhan warga Darfur non Arab dan memperkosa para wanita. Aliran makanan dan air bersih juga di hambat untuk masuk ke wilayah tersebut.<sup>19</sup>

Berbagai pihak di Sudan menganggap pemberitaan ini sangat berlebihan dan dipenuhi dengan motif – motif lain. Dr. Mansour Hasan, Ketua Kafilah Bantuan Kesehatan yang mewakili Asosiasi Dokter Mesir mengemukakan pemberitaan mengenai perkosan massal secara sistemik dan pembantaian massal merupakan bagian dari upaya Barat untuk menekan pemerintah Sudan. Dari hasil

---

<sup>19</sup> Tarbawi, “ *Krisis Darfur : Black Propaganda Untuk Hambat Islamisasi Sudan* “ , Edisi 29 Th.2 , 2 September 2004, hal 35

pemeriksaan 27 ribu kasus penyakit pasien wanita tidak ada satupun laporan mengenai kasus kehamilan ang tidak diinginkan oleh mereka.

Muhammad Habosye , seorang utusan publisistik Al Ahram menyatakan dalam *Seminar Markaz Al Ahram* di Mesir bahwa Darfur telah menjadi krisis yang di sorot oleh dunia internasional akibat eksplotasi berita yang berlebihan dan melewati keadaan yang sebenarnya.

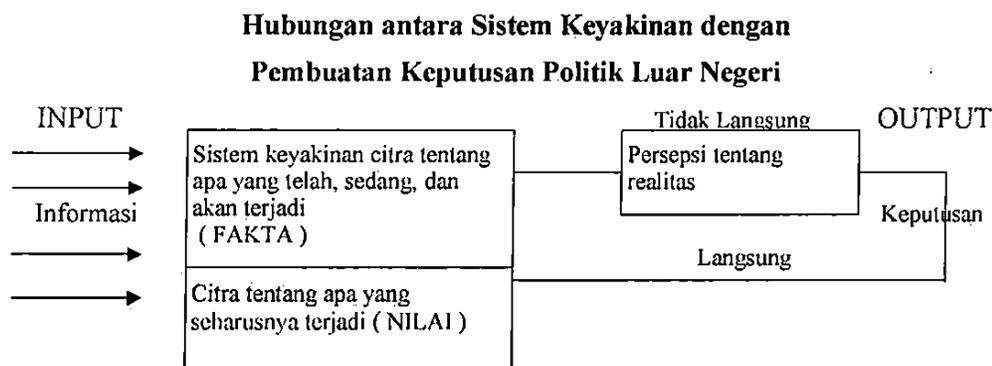
Setelah melakukan kunjungan ke Darfur, Duta Besar Keliling AS untuk kejahatan perang, Richard Phosper mengajukan memo untuk Presiden George W Bush agar segera melakukan intervensi militer di Darfur. Tujuannya untuk menghentikan pembantaian massal. Richard juga menyatakan adanya indikassi Pemerintah Khartoum telah mendukung *Milisi Janjaweed*. Kongres AS pun mendesak Presiden Bush untuk menyatakan bahwa krisis ini sebagai *genoside* dengan tujuan agar Pemerintah AS bisa bertindak sesuai dengan Konvensi PBB 1948. Konvensi itu mengharuskan komunitas internasional untuk mencegah dan menghukum para pelaku dibalik *genoside*.<sup>20</sup>

Pemerintah Amerika Serikat berusaha membawa konflik ini dalam bentuk *humanitarian crisis* sehingga membuka peluang untuk melakukan intervensi. AS juga mengajak sekutunya untuk menyepakati Resolusi PBB yang tidak lain hanya untuk mengabsahkan intervensi yang mereka lakukan.

## 2. Teori Persepsi

Holsti membuat sebuah diagram yang menggambarkan persepsi dan hubungannya dengan citra dan sistem keyakinan seperti terlihat pada gambar berikut.<sup>21</sup>

Gambar 1.1



Sumber : Mohtar Masoed, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*, PAU UGM Yogyakarta, 1989, hal 21

Amerika Serikat menganut beberapa nilai yang berpengaruh pada pembuatan keputusan politik luar negerinya. Nilai – nilai tersebut antara lain falsafah dari John Locke dari Inggris yang terkenal dengan buku “ *The Two Treatises of Government* “, yang pada intinya mengutamakan *life, Liberty, prosperity* ( kehidupan, kebebasan, dan hak milik ).<sup>22</sup>

Presiden Amerika Franklin D Rosevelt, memaparkan secara tegas prinsip – prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia . Amerika mengenal *the four freedom*, sebagai berikut :<sup>23</sup>

### 1. Kebebasan berbicara (*freedom of speech*)

<sup>21</sup> Mohtar Masoed, “*Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*”, PAU UGM Yogyakarta, 1989, hal 21

<sup>22</sup> Sidik Jatmika, “*AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*”, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hal 15

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 16

2. Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
3. Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*)
4. Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*)

Berdasarkan nilai – nilai yang dianut itulah Amerika memandang negara lain sekaligus melakukan penilaian kepada negara – negara yang menjadi patnernya dalam melakukan hubungan luar negeri. Berkaitan dengan fakta – fakta yang pernah dialaminya, Amerika Serikat memiliki pengalaman tersendiri dengan agama islam. Pengalaman ini membentuk persepsi bahwa Islam adalah musuh barat ( musuh Amerika ).

Menurut persepsi orang Amerika , Islam dilihat sebagai budaya yang bermusuhan dan merupakan ancaman bagi kepentingan nilai – nilai budaya bagi mereka. Menurut Gerges ada ketakutan akan bangkitnya Islamisme yang berakar pada hipotesis :<sup>24</sup>

1. Islam tidak sejalan dengan demokrasi
2. Para Islamis terlahir sebagai “ perebut kembali kekuasaan ‘ ( iredentis )

Kedua hipotesis ini muncul berdasarkan kenyataan bahwa Islam pernah mendominasi Eropa dan dunia Barat. Islam pernah memiliki peradaban yang gemilang. Dan mereka tidak menginginkan bangkitnya kejayaan budaya islam, karena akan menjadi ancaman superioritas budaya barat.

Richard Nixon membagi kekuatan politik negara – negar Islam menjadi tiga bagian antar lain: fundamentalisme , konservatif ( *raj'iy* ) dan progresif ( *taqadumy* ).<sup>25</sup> Ciri kaum fundamentalis Islam antara lain : adanya kebencian

<sup>24</sup> Fawaz. AGerges. *Amerika dan Islam Politik, Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan*, Jakarta, Alvabet, 2002, hal 9

<sup>25</sup> M. A. ... dan ... "A ... Daily ... Western ...". Era Intermedia, Solo

terhadap Barat, bersikeras untuk mengembalikan peradaban Islam yang lalu dengan membangkitkan masa lalu itu, bertujuan untuk mengaplikasikan syariah islam, mempropagandakan bahwa Islam adalah agama dan negara, menjadikan masa lalu sebagai penuntun bagi masa depan.<sup>26</sup>

Sedangkan kelompok konservatif adalah bentuk kepemimpinan diktator yang hanya percaya pada partai tunggal. Dan kelompok progresif merupakan kelompok moderat yang berusaha menghubungkan antara dunia islam dengan Barat. Mereka berusaha untuk menghilangkan karakteristik budaya mereka dan menerima hegemoni Amerika.<sup>27</sup>

Amerika Serikat menggunakan pandang ini terhadap Pemerintah Sudan. Pemerintah Sudan yang menerapkan syariah Islam yang artinya cenderung fundamentalis menjadi pertimbangan khusus bagi Amerika Serikat untuk memberikan perhatiannya atas konflik di wilayah Sudan Barat ini, selain motif ekonomi. Persepsi inilah yang mendorong Amerika Serikat berkeras hati untuk menjatuhkan Resolusi atas konflik di Darfur.

Secara logika, batas waktu yang singkat menyulitkan Sudan untuk menyelesaikan Krisis Darfur. Padahal konflik ini telah terjadi sejak dulu. Dan bagi Amerika jika ada celah untuk mengintervensi maka kesempatan itu tidak akan pernah disiaikan. Krisis Darfur yang tak kunjung usai menjadi alasan utama menekan pemerintahan Islam di Sudan.

Selain itu image Sudan yang telah menerima Osama bin Laden pada tahun 1990an, telah membawa Sudan sebagai negara yang dekat dengan teroris,

---

<sup>26</sup> Muhammad Imarah, *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*, Mizan Bandung, 1999, hal 35

<sup>27</sup> ... ..

walaupun Sudan telah memutuskan hubungan tersebut dan mendukung upaya pemberantasan terorisme. Begitu juga dengan adanya kamp – kamp pelatihan milisi islam yang berkaitan dengan negara Afganistan. Walaupun pergerakan ini tidak diakui oleh negara Sudan. Namun kebijakan Sudan yang cenderung pada negara – negara muslim menjadi satu pertimbangan tersendiri bagi AS.

#### **F. Hipotesa :**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas dan pendekatan dengan menggunakan kerangka konseptual dan teoritik maka dapat dikemukakan bahwa :

Amerika Serikat melakukan intervensi terbatas ( *low coercion choice* ) dalam konflik di Sudan dengan tujuan untuk menekan pemerintah Sudan agar menerapkan kebijakan yang lebih pro Amerika Serikat yaitu dengan menggunakan dalih pelanggaran hak asasi manusia dan tuduhan atas terorisme yang dilakukan pemerintah Sudan.

#### **G. Jangkauan Penulisan**

Jangkauan penulisan berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Sehingga nantinya pembahasan tidak mengalami perluasan dan berakibat hasil penulisan karya ilmiah menjadi rancu, kurang terfokus dan kurang ilmiah

Untuk itu, jangkauan penulisan dalam karya ilmiah ini dibatasi jangka waktunya, yaitu mulai awal tahun 2003 – Agustus 2004. Ini dikarenakan pada

Sudan dalam penanganan krisis Darfur serta terhadap proses penyelesaian kesepakatan antara pemerintah Sudan dengan oposisi di selatan. Namun untuk mengetahui lebih mendalam tentang akar permasalahan yang terjadi tidak menutup kemungkinan digunakannya data-data yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan di atas di luar jangka waktu tersebut.

## **H. Tehnik Pengumpulan Data**

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka pemikiran atau teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris.

Pengumpulan data dalam penulisan ini akan dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku literature, majalah, jurnal, laporan tahunan, tabloid, *surfing* dan *browsing* internet serta dari sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang ada.

## **I. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan penulisan dan pemahaman terhadap pemikiran yang akan penulis terangkan dalam tulisan ini, maka sistematika penulisan yang penulis buat adalah sebagai berikut :

Bab I : Bab pendahuluan, memuat tentang : alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar

Bab II : Bab tinjauan pustaka, meliputi pengumpulan data dan

- Bab II : Memuat uraian tentang gambaran umum negara Sudan meliputi letak geografis, sistem pemerintahan, multietnis, agama, bahasa dan perekonomian, serta memuat sejarah konflik di Sudan yang akan diuraikan berdasarkan setiap era kekuasaan di negara tersebut.
- Bab III : Memuat uraian tentang Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, meliputi dasar – dasar kebijakan luar negeri AS, kebijakan Amerika Serikat tentang hak asasi manusia, dan terorisme.
- Bab IV : Memuat uraian tentang Penerapan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Sudan meliputi bentuk – bentuk intervensi, serta tujuan intervensi Amerika Serikat, yaitu dalih pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik dan Sudan sebagai *state sponsored terrorism*.